

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya korporasi atau perusahaan didirikan oleh pemilik dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit motive) dan tujuan-tujuan lain yang diinginkan pemilik, termasuk sustainable profit. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mayoritas atau bahkan seratus persen sahamnya dimiliki pemerintah diharapkan mampu menjadi penggerak (powerhouse) perekonomian Indonesia dan sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara sederhana, BUMN diharapkan mampu memberi kontribusi berharga bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). (Tjager.2003:186) Lingkungan bisnis yang terus berubah menuntut BUMN untuk mampu bertahan dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Mantan Menteri BUMN Tjager (2003:186) menganalogikan BUMN dengan tubuh manusia yang dapat terkena virus, BUMN terkena virus internal dan eksternal sehingga harus segera diobati. Virus internal yang menyerang antara lain rendahnya penerapan Good Corporate Governance. Sehingga tidak ada kewajaran (fairness), transparansi, dan akuntabilitas dalam transaksi bisnis; tidak berfungsinya sistem perencanaan dan pengendalian internal terutama karena kurang berdayanya komisaris sebagai pengawas; tidak efektifnya sistem remunerasi dan insentif sehingga manajemen

berusaha mencari pendapatan di luar sistem; rendahnya integritas Direksi; kegagalan proyek penting dan pembiayaan utang yang berlebihan.

Virus eksternal menyerang perusahaan dalam bentuk intervensi pihak luar yang berkuasa terhadap pengambilan keputusan bisnis oleh direksi sehingga independensinya tidak muncul, krisis ekonomi, kondisi politik yang tidak stabil, perubahan lanskap bisnis seperti globalisasi dan pasar bebas, apresiasi/depresiasi mata uang, perubahan perilaku dan tuntutan konsumen, isu lingkungan, perkembangan teknologi, bencana alam, masalah ketenagakerjaan, masalah Bahan baku, kerusakan dan serangan teroris.

Hal-hal di atas menciptakan inefisiensi BUMN sehingga sulit untuk bersaing dalam kompetisi sistem global. Inefisiensi ini selain merugikan BUMN tetapi juga para stakeholdernya termasuk Pemerintah. Inefisiensi merugikan Negara karena APBN harus menanggung beban kerugian BUMN dimana BUMN seharusnya menjadi powerhouse bagi Negara justru menjadi faktor kerugian Negara. Kebijakan Privatisasi adalah salah satu langkah yang diambil Pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Menurut PP No.33 tahun 2005 pasal 1 Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan masyarakat.

Dewasa ini kegiatan privatisasi Badan Usaha Milik Negara atau disingkat BUMN menjadi isu yang sangat kontroversial. Privatisasi BUMN

yang banyak dijalankan terutama di negara berkembang sering menimbulkan kontroversi terkait dengan tujuan, motivasi, serta implementasi yang disertai banyak distorsi. Beberapa pemikiran yang muncul mendukung privatisasi sebagai konsep untuk menciptakan perbaikan kinerja dan meningkatkan nilai tambah BUMN, sementara pemikiran lain melihat langkah restrukturisasi BUMN lebih tepat dilakukan untuk menghindarkan efek buruk privatisasi (Pranoto, 2011). Menurut Bastian (2002), peran restrukturisasi pada BUMN di Indonesia selama ini justru dilakukan untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan memprivatisasi BUMN tersebut. Apabila kinerja perusahaan BUMN membaik dengan direstrukturisasi, maka diharapkan proses privatisasi BUMN dapat berjalan dengan lancar dan mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, privatisasi didefinisikan sebagai penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat. Penjualan saham tersebut bisa dilakukan melalui mekanisme penawaran umum saham kepada publik (IPO) atau dapat pula dilakukan melalui mekanisme strategic sales, yaitu menjual langsung ke investor strategis tanpa melalui mekanisme pasar modal.

Pemikiran yang mendukung perubahan status BUMN menjadi perusahaan terbuka, melihat bahwa kinerja BUMN akan menjadi lebih baik jika perusahaan tersebut menjadi perusahaan publik. Dengan menjadi perusahaan publik, hal tersebut akan mendorong terciptanya transparansi pada tata kelola perusahaan BUMN. Menurut studi yang dilakukan Bank Dunia dalam ICGGS (2003), ada beberapa fenomena yang cenderung negatif dalam tubuh BUMN yang belum diprivatisasi, yaitu *Pertama*, kebanyakan BUMN menyedot anggaran pemerintah yang sebenarnya bisa dialokasikan untuk pelayanan sosial. *Kedua*, kebanyakan BUMN mengambil kredit untuk investasi yang tidak tepat. *Ketiga*, kebanyakan BUMN lebih polutif daripada industri swasta. *Keempat*, kebanyakan perbaikan BUMN menghasilkan manfaat dalam mengurangi defisit fiskal.

Bank Dunia menilai bahwa para birokrat (pemerintah) tidak mampu mengelola bisnis dengan baik, hal tersebut disebabkan bukan karena birokrat tidak mempunyai kompetensi, akan tetapi karena mereka menghadapi kontradiksi, yaitu apakah mereka berperan sebagai pemain bisnis atau sebagai pelayan publik. Pemerintah yang melakukan privatisasi pada perusahaan milik negara (BUMN) dapat dipastikan memiliki motif tertentu.

Menurut Sulistio dalam Soegiharto (2005), privatisasi yang dilakukan oleh perusahaan milik negara akan merubah kultur BUMN tersebut, sehingga BUMN benar-benar berkonsentrasi untuk mencapai misi utamanya, yakni memaksimalkan kekayaan pemegang saham atau

memaksimalkam profit. Dari sisi fiskal pemerintah, hal tersebut berarti akan meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Oleh sebab itu menurut Soedjais dalam Soegiharto (2005), secara umum privatisasi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara sesungguhnya lebih banyak berdampak positif terhadap BUMN yang melakukannya.

Beberapa BUMN yang sudah melakukan privatisasi melalui IPO adalah PT Perusahaan Gas Negara Tbk (2003), PT BRI Tbk (2003), PT Bank Mandiri Tbk (2003), PT Adhi Karya Tbk (2004), PT Jasa Marga (2007), PT Pembangunan Perumahan Tbk (9 Februari 2010), PT Krakatau Steel Tbk (10 November 2010), PT Garuda Indonesia (11 Februari 2011), PT Waskita Karya Tbk (19 Desember 2012), dan PT Semen Baturaja Tbk (28 Juni 2013). Secara garis besar, privatisasi tersebut merupakan usaha dalam memenuhi kebutuhan modal perseroan. Selain itu privatisasi merupakan bagian dari tahapan yang harus dilakukan agar bisa menjadi perusahaan terkemuka sesuai dengan visi perusahaan.

Keputusan BUMN dalam melakukan privatisasi merupakan suatu keputusan yang kompleks, hal tersebut dikarenakan privatisasi dapat memunculkan adanya kerugian dan biaya baru, sehingga hal tersebut dapat menggagalkan cita-cita perseroan. Selain itu keputusan sebuah perusahaan baik BUMN maupun perusahaan milik swasta untuk menjadi perusahaan publik merupakan suatu keputusan yang penuh dengan pertimbangan dan perhitungan. Karena dengan menjadi perusahaan publik, maka perusahaan tersebut akan dihadapkan pada beberapa konsekuensi langsung baik yang

bersifat menguntungkan maupun yang merugikan. Disamping biaya yang harus ditanggung setelah menjadi perusahaan publik, perseroan juga akan mendapat tekanan untuk meningkatkan performansi dan membayarkan deviden kepada pemegang saham yang jumlahnya bertambah. Untuk itu harus diwaspadai bahwa keberhasilan pada jangka panjang mungkin akan terancam bila manajemen dipaksakan untuk mengejar tujuan jangka pendek pemegang saham (Sitompul, 2004).

Salah satu indikator terpenting untuk mengetahui pengaruh privatisasi yang dilakukan adalah dengan menganalisa kinerja keuangan BUMN yang melakukan privatisasi tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka akan menarik untuk diadakan penelitian mengenai **“Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Privatisasi Pada BUMN yang Terdaftar di BEI Periode 2010-2013”** dalam penelitian ini yaitu pada 5 perusahaan BUMN yang melakukan privatisasi melalui IPO yaitu PT Pembangunan Perumahan Tbk (9 Februari 2010), PT Krakatau Steel Tbk (10 November 2010), PT Garuda Indonesia (11 Februari 2011), PT Waskita Karya Tbk (19 Desember 2012), dan PT Semen Baturaja Tbk (28 Juni 2013). kinerja keuangan perseoran dapat dinilai melalui laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan, berdasarkan laporan keuangan tersebut maka dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang lazim dijadikan dasar penilaian kinerja perusahaan. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kinerja profitabilitas (gross profit margin, net profit margin, return on assets, dan return on equity), efisiensi (total aset turnover), likuiditas

(current ratio), dan solvabilitas atau leverage (debt to total assets dan debt to equity ratio) sesuai dengan keputusan Menteri BUMN No KEP-100/MBU/2002 tentang tata cara pengukuran tingkat kesehatan BUMN di Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah

Perubahan status perseroan menjadi perusahaan publik adalah sebagai upaya untuk pengembangan perseroan dan peningkatan kinerja demi mencapai visi perseroan. Maka setelah perubahan status tersebut, perseroan diharapkan dapat menunjukkan kinerja keuangannya. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah Bagaimana Perbandingan Kinerja Keuangan GPM (Gross Profit Margin), NPM (Net Profit Margin), ROA (Return On Asset), ROE (Return On Equity), DTA (Debt to Total Asset), DER (Debt to Equity Ratio), CR (Current Ratio), dan ATO (Asset Turn Over) Sebelum Dan Sesudah Privatisasi Pada BUMN yang Terdaftar di BEI Periode 2010-2013?

1.3 Batasan Masalah

1.3.1 Penelitian ini difokuskan pada apakah privatisasi melalui IPO berpengaruh terhadap kinerja keuangan atau tidak, dengan membandingkan kondisi keuangan BUMN yang Terdaftar di BEI sebelum privatisasi dengan sesudah privatisasi periode 2010-2013.

Kondisi kinerja keuangan dianalisis dengan rasio keuangan. Selanjutnya untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh privatisasi melalui IPO terhadap kinerja keuangan, digunakan analisis dengan uji t Paired T-Test.

- 1.3.2 Kinerja keuangan diukur dengan ratio Profitabilitas (Gross Profit Margin, Net Profit Margin, Return On Assets, dan Return On Equity) Efisiensi (Total Asset Turn Over), Rasio likuiditas (Current ratio), dan rasio Solvabilitas atau Leverage (Debt to total assets dan Debt to equity ratio).

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- 1.4.1 Untuk mengetahui Kinerja Keuangan BUMN yang Terdaftar di BEI Sebelum dilakukan Privatisasi.
- 1.4.2 Untuk mengetahui Kinerja Keuangan BUMN yang Terdaftar di BEI Setelah dilakukan Privatisasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berikut:

- 1.5.1 Bagi pemerintah.

Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam hal proses pembuatan kebijakan oleh pemerintah, di mana pemerintah dapat mempertimbangkan temuan dalam menentukan waktu, kondisi paling cocok dalam melakukan

privatisasi terhadap BUMN, dan apakah privatisasi masih merupakan alternatif terbaik dalam meningkatkan kinerja BUMN dan mampu meningkatkan pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan. Hasil penelitian ini juga akan menjadi acuan untuk evaluasi pada kesuksesan program privatisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dengan demikian, para pembuat kebijakan dapat merancang kebijakan privatisasi lebih tepat lagi dalam rangka mencapai hasil yang lebih sukses.

1.5.2 Bagi akademisi.

Telah ada beberapa penelitian yang membahas dampak privatisasi terhadap kinerja BUMN yang dilakukan di berbagai negara dengan kondisi ekonomi yang berbeda, dengan karakteristik populasi yang berbeda, dan berbagai industri yang berbeda. Namun pada penelitian kali ini secara khusus membahas dampak privatisasi terhadap kinerja keuangan BUMN di Indonesia, yang jelas memiliki karakteristik kunci yang berbeda dengan negara lain. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap teori yang ada, yang diterapkan pada fenomena yang berbeda. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk penelitian lebih lanjut.

1.5.3 Bagi masyarakat.

Kontribusi penelitian ini terhadap masyarakat adalah bahwa mereka sekarang dapat menerapkan pengetahuan mereka dari hasil studi mengenai privatisasi dalam membuat keputusan tentang investasi di BUMN yang telah diprivatisasi.

1.5.4 Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan dan informasi tambahan agar penelitian selanjutnya dapat memperoleh hasil yang lebih baik.